

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN. 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;


- ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Kecamatan.

Pasal 5

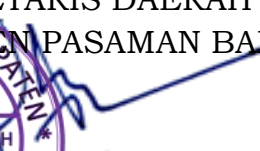
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi data, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 9 Program dan 15 Kegiatan serta 21 Sub Kegiatan, dimana sebagian besar kegiatan terlaksana dengan sangat baik dan ada kegiatan yang capaiannya kurang baik. Mengenai rencana Kerja tersebut akan diuraikan dalam Bab-bab Laporan ini.

Segala keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat akan tetap dipertahankan dan diupayakan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/ hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Padang Tujuh, Juli 2022

Plt. Kepala



Asri Hamdi, ST

Pembina / IV.a

NIP. 19761123 200501 1 012

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR PUSTAKA	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKPP Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPKPP.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	19
2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat.....	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	29
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	37
BAB V PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses dan upaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Agar pembangunan yang dilaksanakan mencapai hasil yang telah ditetapkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu yang mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri. Perencanaan pembangunan daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam memetakan potensi yang ada secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian alan dan lingkungan, sehingga strategi yang dirumuskan melalui implementasi sistem perencanaan dapat dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional sekaligus merupakan pedoman kerja untuk menterjemahkan dan mengimplementasikan perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD juga memberikan jaminan terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjadi salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja .

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 berisikan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang bersifat teknis operasional. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dibidang perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas antara lain perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun secara partisipatif dan demokratis yang dihasilkan melalui proses pemikiran strategis dalam memenuhi kebutuhan dan menyikapi isu yang berkembang untuk kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan OPD. Tahapan selanjutnya Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga disusun secara terpadu dengan memperhitungkan standar pelayanan minimal, Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat dua jenis pelayanan yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);

22. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
25. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/729/Bup.Pasbar Tahun 2021 tentang Kawasan Kumuh

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat ini disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang berisikan program dan kegiatan yang terukur sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode 1 (satu) tahun.
2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
3. Sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta sebagai tolok ukur kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis Rencana Kerja (Renja) OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

1. Memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
2. Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja (Renja).

3. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.
4. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
5. Renja setidaknya memuat pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun lalu, tujuan, sasaran, rencana kerja dan pendanaan dan penutup.
6. Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjadi rancangan RKPD pemerintah daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- I.1 **Latar Belakang;** memuat gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- I.2 **Landasan Hukum;** memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- I.3 **Maksud dan Tujuan;** memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- I.4 **Sistematika Penulisan;** menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 **Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD,** Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 **Analisis Kinerja Pelayanan OPD,** memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,** memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

- 2.4 **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat** menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1 **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 **Tujuan dan sasaran Renja OPD**, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 **Program dan Kegiatan**, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKPP Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPKPP

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 10 (sepuluh) program dengan 19 (Sembilan belas) kegiatan serta 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan. Sedangkan pada tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 11 (sebelas) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan serta 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun sebelumnya serta tahun yang akan datang.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan realisasi capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2022) sebagaimana Tabel 2.1.1 (Tabel TC.29) berikut ini :

Tabel T-C 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tercapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjan g urusan pemerinta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkat nya pelayanan administrasi perencanaan, kinerja keuangan dan administrasi								
1 04 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkat nya pelayanan administrasi perencanaan, kinerja keuangan dan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1 04 01	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Meningkat nya pelayanan administrasi perencanaan, kinerja keuangan dan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan, kinerja keuangan dan administrasi dan sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1 04 01	2.06									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan, kinerja keuangan dan administrasi dan sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1 04 01	2.07									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan, kinerja keuangan dan administrasi dan sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1 04 01	2.08									

KODE	Urusan/Eidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					1	2	3	4		5	6	7	8=7/6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan, kinerja keuangan dan administrasi dan sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi	100%	100%		100%	100%	100%	100%		300%	300%	
1 04 01	2.09												
	PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%			100%	100%	100%	100%		100%	200%	200%
1 04 02													
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Ko ta	Tersedianya Data Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program pemerintah	100%			100%	100%	100%	100%		100%	200%	200%
1 04 02	2.01												
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Ko ta	Rasio Rumah Korban Bencana yang tertangani	100%			100%	100%	100%	100%		100%	200%	200%
1 04 02	2.02												
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Ko	Rasio Rumah Korban Bencana yang tertangani	100%			100%	100%	100%	100%		100%	200%	200%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Hasil Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1 04 02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
1 04 03		PROGRAM KAWASAN PERUMUKIMAN	1,48	4,51	4,24%	4,24%	100%	3,68%	459%	310%
1 04 03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (seputuh) Ha	100%		4,24%	4,24%	100%	3,68%	8%	8%
1 04 04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN KUMUH	92.34%	86,77%	87,74%	87,74%	100%	87,79%	262%	# VALUE
1 04 04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,99	87,74%	87,74%	100%	87,79%	9974,53%	9975%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Rerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Rerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1										
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkup yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0.95%		0.15%	0.15%	100%	0.41%	0.56%	# VALUE
1 04 05	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Lingkup yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%		0.15%	0.15%	100%	0.41%	0.56%	1%
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan yang Terealisasi	95%		0%	0%	# DIV/OI	50%	50.00%	53%
1 04 06	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Keoll	Persentase Pengembangan yang Terealisasi	100%		0%	0%	# DIV/OI	50%	50.00%	50%
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300.00%	300%
2 10 02	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Ko ta	Persentase Penyelesaian izin lokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300.00%	300%

KODE	Urusan/Ekddang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kejuaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Percapaian Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300,00%	300%
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300,00%	300%
2 10 04	2,01		100%	100%	100%	100%	100%	100%	300,00%	300%
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah	58	4	5	5	100%	7	1600,00%	28%
2 10 05										
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	58	4	5	5	100%	7	1600,00%	28%
2 10 05	2,01		58	4	5	5	100%	7	1600,00%	28%

Dari Tabel T-C 29 diatas dapat diketahui bahwa semua program/kegiatan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk TA 2021 terealisasi dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dan di tahun 2022 mengalami peningkatan target yaitu untuk program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). Untuk program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditahun 2021 tidak anggarakan dan ditahun 2022 dianggarkan dengan target 50%.

Tabel 2.1.2.

Evaluasi Realisasi Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase areal kawasan kumuh	4,24 %	4,24 %	100 %
2	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87,79 %	87,79 %	100 %
3	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase pengembang yang tersertifikasi	50 %	50 %	100 %
4	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0,41	0,41	100 %
5	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0
6	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	0
7	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100 %	100 %	100 %
8	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100 %	100 %	100 %
9	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	7	7	100 %
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP	B	B	100 %
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Level maturitas SPIP	2	2	100 %
TOTAL					100,00%

Berdasarkan Tabel 2.1.1. dan 2.1.2. dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 program teknis dan 3 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan. Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 3 sasaran yang dijabarkan kedalam 7 (Tujuh) indikator sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, yaitu :

Tabel 2.1.3
Penilaian Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Predikat
1	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase areal kawasan kumuh	4,24 %	4,24 %	100 %	Sangat Baik
2	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87,79 %	87,79 %	100 %	Sangat Baik
3	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase pengembang yang tersertifikasi	50 %	50 %	100 %	Sangat Baik
4	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0,41	0,41	100 %	Sangat Baik
5	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0	tidak dinilai
6	Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0	0	tidak dinilai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Predikat
7	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase penyelesaian izin lokasi	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
8	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
9	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah fasilitasi ganti rugi tanah	7	7	100 %	Sangat Baik
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100 %	Sangat Baik
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP	B	B	100 %	Sangat Baik
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Level maturitas SPIP	2	2	100 %	Sangat Baik
TOTAL					100,00%	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terlaksananya dengan predikat “sangat baik” sebanyak 10 indikator
- Sebanyak 2 indikator tidak dapat dinilai hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran akibat penanggulangan wabah Covid 19.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan pada Peraturan Bupati No 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi :

1. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

5. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada RPJMD Tahun 2021-2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran Kepala Daerah pada misi III. Berdasarkan hal tersebut diatas telah ditetapkan 2 (satu) tujuan strategis pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1

**Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi
Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021-2026**

Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing	Mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya, aman, tentram, dan tangguh	Masyarakat yang rukun dan berkeadilan	Pemenuhan penyelesaian konflik pertanahan Indikator: 1. Persentase penyelesaian izin lokasi 2. Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi 3. Jumlah fasilitasi ganti rugi
Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting	Mewujudkan pembangunan dan kawasan permukiman layak Indikator: 1. Persentase areal kawasan kumuh 2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 3. Persentase pengembang yang tersertifikasi 4. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 5. Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 6. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2022 sebagaimana diuraikan pada tabel T-C 30 berikut ini:

Tabel T-C 30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	SPM	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	100 %	100 %	100 %	100 %	0	100 %	100 %	100 %	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	SPM	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.	100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	Belum Pernah Dilakukan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah belum terealisasi di tahun 2020 dan 2021 karna tidak ada yang dinyatakan sebagai bencana kabupaten. Di tahun 2022 pada tanggal 25 Februari terjadi gempa di Kabupaten Pasaman Barat dan dinyatakan sebagai bencana kabupaten yang menyebabkan banyak rumah korban bencana yang rusak baik rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana direncanakan realisasinya di triwulan IV Tahun Anggaran 2022. dan 2023 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah ditargetkan 100%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan pengembangan kawasan permukiman
- 2) Belum tercapainya capaian program pemerintah (Universal access) 100-0-100 yaitu 100 % akses air bersih, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi
- 3) Perubahan/Pergeseran pola tata ruang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana untuk mengimbangi rencana pengembangan infrastruktur permukiman.
- 4) Dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan BPN dalam percepatan sertifikasi tanah Pemerintah Daerah.
- 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya yang dapat dilakukan adalah mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, sehingga diperoleh aparatur yang berkualitas
- 6) Pemberantasan daerah tertinggal dan terisolir. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pembangunan yang terarah dan berkeadilan di daerah tertinggal baik dalam hal peningkatan kualitas perumahan dan pemenuhan ketersediaan cakupan air bersih, sanitasi, dan listrik.
- 7) Pembangunan Infrastruktur Sarana Prasarana Wilayah. Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan pekerjaan pembangunan infrastruktur dan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) di wilayah perumahan.
- 8) Belum adanya program jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan program (Rencana Induk Sistem) maupun validitas database tentang Perumahan dan PSU yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pasaman Barat. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pembuatan database yang terstruktur dan sistematis.
- 9) Program pembangunan masih bersifat parsial, belum ada sinkronisasi yang efektif dan efisien antara OPD maupun instansi terkait. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi yang efektif serta berkesinambungan dalam hal pembangunan perumahan.
- 10) Belum terciptanya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tepat dan akurat. Untuk itu perlu dibuat sistem yang baik dalam hal monitoring dan evaluasi pembangunan dibidang perumahan

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp. 14,201,151,089,- (empat belas milyar dua ratus satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah) untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2023. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) program dan 15

(Lima belas) kegiatan serta 21 (Dua puluh satu) sub kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel T-C 31 berikut ini:

Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pasaaman Barat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		4.405.527.942	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.405.527.942
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dan sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi		3.534.527.942	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dan sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi	100 %	3.534.527.942
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.188.723.842	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bul	3.188.723.842
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		345.804.100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	345.804.100
	2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dan sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi		109.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dan sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi	100 %	109.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		109.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	109.000.000
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dan sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi		165.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dan sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi	100 %	165.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		165.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	165.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dana sarana prasarana perkantoran serta		225.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan	100 %	225.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	6.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		35.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	35.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		184.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	184.000.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dana sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi		152.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dana sarana prasarana	100 %	152.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		152.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	152.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dana sarana prasarana perkantoran serta penataan organisasi		100.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi	100 %	100.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		50.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	50.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dan sarana prasarana pemerintahan serta	120.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan	100 %	120.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekhar dan dibayarkan Pakajanya	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekhar dan dibayarkan Pakajanya	20 Unit	80.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipekhar	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipekhar	60 Unit	40.000.000
II	PROGRAM PENGEMBANQAN PERUMAHAN		Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	2.241.750.000	PROGRAM PENGEMBANQAN PERUMAHAN	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	11.200.000.000
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		Realisasi penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	2.241.750.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Realisasi penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat terdampak	2204 unit rumah	11.200.000.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terhabilitasi		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terhabilitasi	2200 Unit Rumah	11.000.000.000
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2.241.750.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit Rumah	200.000.000
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase areal kawasan kumuh	4.302.693.380	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase areal kawasan kumuh	2,95 %	4.302.693.380
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase areal kawasan kumuh	4.302.693.380	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase areal kawasan kumuh	2,95 %	4.302.693.380
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Dipekhar	1.212.693.380	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Dipekhar	150 Unit Rumah	1.212.693.380
3	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	3.090.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	58 Ha	3.090.000.000

No.	Rencana Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
IV	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Cakupan keterediaan rumah layak huni	2.010.976.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan keterediaan rumah layak huni	90,04 %	2.010.976.000
	Pencengahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan keterediaan rumah Layak Huni	2.010.976.000	Pencengahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan keterediaan rumah Layak Huni	90,04 %	2.010.976.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	2.010.976.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	100 Unit Rumah	2.010.976.000
V	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	935.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0,59 %	935.000.000
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	935.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0,59 %	935.000.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Pungai Hunian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Pungai Hunian	935.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Pungai Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Pungai Hunian	20 Lokasi	935.000.000
VI	PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN REGISTRASI		Persentase Pengembangan Yang Tersertifikasi	55.000.000	PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN REGISTRASI	Persentase Pengembangan Yang Tersertifikasi	60 %	55.000.000
	1 bagi Orang atau Badan Hukum yang Melakukan Koordinasi atau Pengawasan, Pemberian Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		Persentase Pengembangan yang tersertifikasi	55.000.000	1 bagi Orang atau Badan Hukum yang Melakukan Koordinasi atau Pengawasan, Pemberian Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Persentase Pengembangan yang tersertifikasi	60 %	55.000.000
		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	55.000.000		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Sertifikasi dan Registrasi	20 Laporan	55.000.000
VII	PROGRAM PENGELOLAAN LIZIN LOKASI		Penyelesaian Izin Lokasi (%)	21.406.140	PROGRAM PENGELOLAAN LIZIN LOKASI	Penyelesaian Izin lokasi (%)	100 %	21.406.140
	1 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penyelesaian Izin Lokasi	21.406.140	1 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Izin Lokasi	100 %	21.406.140
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelesaian Izin Lokasi	21.406.140	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Penyelesaian Izin Lokasi	100 Persen	21.406.140

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
VIII	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase konflik pertanahan difasilitasi		48.163.815	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100 %	48.163.815
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah konflik tanah pemda/ tanah ulayat yang difasilitasi		48.163.815	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konflik tanah pemda/ tanah ulayat yang difasilitasi	100 %	48.163.815
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		48.163.815	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Berita Acara	48.163.815
IX	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah		180.633.812	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah	9 Angka	180.633.812
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi ganti rugi tanah		180.633.812	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi ganti rugi tanah	9 angka	180.633.812
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		180.633.812	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	180.633.812
JUMLAH					14.201.151.089				23.159.401.089

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, sehingga memfasilitasi agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi OPD yang melayani masyarakat.

Proses yang telah dilakukan dalam menampung aspirasi serta menelaah semua usulan program yang akan dituangkan dalam Renja OPD 2023 adalah :

1. Menampung aspirasi masyarakat melalui forum musrenbang kecamatan dan Forum OPD.
2. Melakukan kunjungan lapangan untuk melihat lokasi yang diusulkan serta melakukan pengukuran.
3. Menuangkan usulan program tersebut dalam renja dan DPA OPD.

Berikut ini disajikan pada table T-C 32 tentang usulan program dari masyarakat:

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Pasaman Barat	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2200 Unit Rumah	Musrenbang
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pasaman Barat	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit Rumah	Musrenbang
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pasaman Barat	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	150 Unit Rumah	Pokir & Musrenbang
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Pasaman Barat	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	58 Ha	Pokir & Musrenbang
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pasaman Barat	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	Pokir & Musrenbang
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pasaman Barat	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 Lokasi	Pokir & Musrenbang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi pada tahun 2023 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

Tema RKP Tahun 2023	Tema RKPD Provinsi Tahun 2023	Tema RKPD Kabupaten Tahun 2023
Peningkatan Produktivitas dan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas sektor unggulan untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dan berketahanan

Persandingan Prioritas RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten

Prioritas RKP Tahun 2023	Prioritas RKPD Provinsi Tahun 2023	Prioritas RKPD Kabupaten Tahun 2023
<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan 3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job 4. Mendorong pemulihan dunia usaha 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas 6. Ekonomi hijau 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan 2. Peningkatan infrastruktur dasar dan mitigasi bencana 3. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian, peternakan dan perikanan 4. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat 5. Mendorong pertumbuhan dan pemulihan dunia usaha dan ekonomi kreatif 6. Peningkatan pengamalan ajaran agama, nilai-nilai luhur dan budaya 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan program pengambilan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Secara umum, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Pengentasan kemiskinan dan Penanganan Stunting	Persentase Areal Kawasan Kumuh	2,95%
			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	86,89%
			Persentase Pengembang Yang Tersertifikasi	60%
			Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan PSU	59%
			Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%
2	Pemenuhan Penyelesaian Konflik Pertanahan	Masyarakat Rukun yang berkeadilan	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100%
			Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100%
			Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah	9
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
			Nlai Sakip	A
		Pengentasan kemiskinan dan Penanganan Stunting	Level Maturitas SPIP	3

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 mencakup 9 Program dan 15 Kegiatan serta 21 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

8. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

III. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

9. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

IV. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

10. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

V. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

11. Urusan Penyelenggaraan Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

VI. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

12. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat kemampuan Kecil

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

VII. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI

13. Penerbitan Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

VIII. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

14. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

IX. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

15. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel T-C 33

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Mula Tahun 2024 Kabupaten Pasmam Barat

lengkap 1 dari 5

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Kebijakan	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
											Nasional	Daerah				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.909.197.322							11.914.697.322				
1 04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1 04 01		PROGRAM PEMERINTAHAN PERUMAHAN PEMERINTAHAN DAERAH	%		100 %	4.405.527.942						100 %	4.405.527.942			
1 04 01 202		Administrasi Kawasan Perumahan Daerah	%		100 %	3.534.527.942						100 %	3.534.527.942			
1 04 01 202 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			26 Orang/bul	3.188.723.842 an		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saling Inovatif		26 Orang/bul	3.188.723.842	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 202 02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			50 Dokumen	345.804.100		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saling		50 Dokumen	345.804.100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		100 %	109.000.000							100 %	109.000.000		
1 04 01 203 06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			20 Laporan	109.000.000		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Perumahan Dan Transformasi		20 Laporan	109.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 203		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100 %	165.000.000							100 %	165.000.000		
1 04 01 203 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			26 Orang	165.000.000		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saling		26 Orang	165.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan															
Kode	Urusan / Bidang Program / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPJPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Kebudayaan	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 206	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi, perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi													

Capaian Kinerja dan Kinerja Pelaksanaan													
Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target Tahun 2021	Prekiriann Capaian Target RPJMD Tahun 2023	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kolompo ke Sasaran	Prekiriann Mula Rencana Tahun 2024
										Regional	Daerah		Target
1 04 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	50.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	Penunjang Urusan Kantor	20 Laporan
1 04 01 209	Pembelaksanaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertastahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi perencanaan, kinerja Keuangan dan administrasi dasarnya	%	%	100 %	120.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	Barang Milik Daerah	100 %	120.000.000
1 04 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibiayaskan Pajaknya			20 Unit	80.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Barang Milik Daerah	20 Unit	80.000.000
1 04 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin/Lainnya yang Dipelihara			60 Unit	40.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	Barang Milik Daerah	60 Unit	40.000.000
1 04 02	PROGRAM PEMERBAHAN PERUMAHAN	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	%	100 %	11.200.000.000						100 %	200.000.000
1 04 02 203	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Relokasi Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak huni/bagi masyarakat terdampak relokasi	%	%	100 %	11.200.000.000						100 %	200.000.000
1 04 02 203 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Tersehatkan			2200 Unit Rumah	11.000.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	Barang Milik Daerah	2200 Unit Rumah	11.000.000.000
1 04 02 203 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang Tersehatkan	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Tersehatkan			4 Unit Rumah	200.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	Barang Milik Daerah	4 Unit Rumah	200.000.000
1 04 03	PROGRAM KAWASAR PERUMAHAN	Persentase awal kawasan kumuh	%	%	2,95 %	4.302.693.380	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	Barang Milik Daerah	2,95 %	4.302.693.380
1 04 03 203	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Tesis di	Persentase awal kawasan kumuh	%	%	2,95 %	4.302.693.380	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	Barang Milik Daerah	2,95 %	4.302.693.380
1 04 03 203 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			150 Unit Rumah	1.212.693.380	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	Barang Milik Daerah	150 Unit Rumah	1.212.693.380
1 04 03 203 06	Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Ditemajukan/Dipugar			58 Ha	3.090.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	Barang Milik Daerah	58 Ha	3.090.000.000

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan																
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian REPD Tahun 2021	Prakiraa Capaian Target REPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraa Majin Rencana Tahun 2024		Pengaruh Daerah Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikator	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Nasional	Daerah					
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	%	90,04 %	2.010.976.000						90,04 %	2.010.976.000			
1 04 04 201	Perencanaan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	%	90,04 %	2.010.976.000						90,04 %	2.010.976.000			
1 04 04 201 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkenbangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkenbangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan			100 Unit Rumah	2.010.976.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengertasaan kemiskinan dan penyediaan pembudayaan mayarakat	Mayarakat yang mempunyai RTLH di luar kawasan kumuh	100 Unit Rumah	2.010.976.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung	%	%	0,59 %	935.000.000						0,59 %	935.000.000			
1 04 05 201	Urusan Penyelenggaraan RW Perumahan	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung	%	%	0,59 %	935.000.000						0,59 %	935.000.000			
1 04 05 201 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang			20 Lokasi	935.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pengertasaan kemiskinan dan penyediaan pembudayaan mayarakat	Perumahan yang dibangun oleh Perumahan	20 Lokasi	935.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYARAN BERSIFAT, KUALITAS, KUALITAS, DAN KUALITAS	Persentase Pengembang Yang Tersertifikasi	%	%	60 %	55.000.000						60 %	60.500.000			
1 04 06 201	Sertifikasi dan Regulasi bagi Orang-orang Badan Rumah yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase Pengembang yang tersertifikasi	%	%	60 %	55.000.000						60 %	60.500.000			
1 04 06 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Regulasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Regulasi Pengembang			20 Laporan	55.000.000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengertasaan kemiskinan dan penyediaan pembudayaan mayarakat	Perumahan g perumahan	20 Laporan	60.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		

Capaian Kinerja dan Kerasangan Pendanaan															
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerasangan Pendanaan					Kelompok K Sasaran	Praktikan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penasipung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatorif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatorif		
										Nasional					Daerah
2		URUSAN PEMERINTAHAN WADATYANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			250.303.767								250.303.767		
2 10		PROGRAM PENGOLAHAN IZIN	Penyelesaian izin lokasi (%)	%	100 %		21.406.140						100 %	21.406.140	
2 10 02		Pembelian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah	Penyelesaian izin lokasi	%	100 %		21.406.140						100 %	21.406.140	
2 10 02 201		Koordinasi dan Sinkronisasi	Penyelesaian izin lokasi		0			Kab. Pasaman Barat, Semau Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pengertinaan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat		0		Dinas Perumahan dan Permukiman
2 10 02 201 01		Pemenuhan Izin Lokasi Pemenuhan Modal dan Kemudahan Berusaha	Penyelesaian izin lokasi		100 Persen		21.406.140	Kab. Pasaman Barat, Semau Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Investor	21.406.140		Dinas Perumahan dan Permukiman
2 10 04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	Pemerataan konflik pertanahan	%	100 %		48.163.815						100 %	48.163.815	
2 10 04 201		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapas dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah konflik tanah pendk./tanah ulayat yang	%	100 %		48.163.815						100 %	48.163.815	
2 10 04 201 02		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah		25 Berita Acara		48.163.815	Kab. Pasaman Barat, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan penggunaan ajaran agama, nilai-nilai luhur dan budaya	Masyarakat yang berkonflik pertanahan	25 Berita Acara		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2 10 05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI Rugi TANAH DAN SANKSI	Jumlah Pengalihan Ganti Rugi Tanah	Angka	9 Angka		180.633.812						9 Angka	180.633.812	
2 10 05 201		Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah untuk Pemenuhan oleh Pemerintah	Jumlah Penyaluran ganti rugi tanah	angka	9 angka		180.633.812						9 angka	180.633.812	
2 10 05 201 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah untuk Pemenuhan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah		20 Dokumen		180.633.812	Kab. Pasaman Barat, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan penggunaan ajaran agama, nilai-nilai luhur dan budaya	Masyarakat yang terkena ganti rugi	20 Dokumen		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
TOTAL							23.159.401.689						12.164.901.689		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2023 merupakan implementasi tahun ke-2 dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman layak yang diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD. Prioritas Pembangunan diterjemahkan kedalam 8 (delapan) sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Berikut ini Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2023 pada Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat :

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode 12/12/2021	Realisasi Capaian KSPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian KSPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Berdasarkan						Kategori Sasaran	Proyeksi Maju Rencana Tahun 2024		Keterangan
						Target 2023	Pagu Indikat	Lokasi	Sumber Dana	Prestasi			Target	Pagu Indikat	
										Nasional	Daerah				
1						22.008.197.322							11.914.697.322		
1 04		PROGRAM													
1 04 01	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	Salipin pelayanan pemerintah urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %		4.405.527.942					100 %	4.405.527.942	
		Meningkatnya pelayanan Administrasi keuangan, kinerja keuangan dan administrasi keuangan pemerintah serta pelayanan organisasi	%		%	100 %		3.534.527.942					100 %	3.534.527.942	
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/Person		3.108.723.842					26 Orang/Person	3.108.723.842	
		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan				Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sambutan Daya Maksimal Yang Berakutasi Dan Berakutasi Saling					Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Ayatanu Sipil Mogara	
1 04 01 2.02 01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/Person		3.108.723.842					26 Orang/Person	3.108.723.842	
		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan				Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sambutan Daya Maksimal Yang Berakutasi Dan Berakutasi Saling					Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Ayatanu Sipil Mogara	
1 04 01 2.02 02	Pengadaan Administrasi Pelayanan Tugan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Administrasi Pelayanan Tugan ASN				50 Dokumen		345.804.100					50 Dokumen	345.804.100	
		Kab. Paseran Bera, Semua Kecamatan, Kecurahan				Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sambutan Daya Maksimal Yang Berakutasi Dan Berakutasi Saling					Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Ayatanu Sipil Mogara	
1 04 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi keuangan, kinerja keuangan dan administrasi keuangan pemerintah serta pelayanan organisasi	%		%	100 %		109.000.000					100 %	109.000.000	
		Kab. Paseran Bera, Semua Kecamatan, Kecurahan				Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sambutan Daya Maksimal Yang Berakutasi Dan Berakutasi Saling					Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Ayatanu Sipil Mogara	
1 04 01 2.03 05	Pembayaran Barang Milik Daerah pada SPDP	Jumlah Laporan Pembayaran Barang Milik Daerah pada SPDP				20 Laporan		109.000.000					20 Laporan	109.000.000	
		Kab. Paseran Bera, Semua Kecamatan, Kecurahan				Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sambutan Daya Maksimal Yang Berakutasi Dan Berakutasi Saling					Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Ayatanu Sipil Mogara	
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi keuangan, kinerja keuangan dan administrasi keuangan pemerintah serta pelayanan organisasi	%		%	100 %		165.000.000					100 %	165.000.000	
		Kab. Paseran Bera, Semua Kecamatan, Kecurahan				Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sambutan Daya Maksimal Yang Berakutasi Dan Berakutasi Saling					Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Ayatanu Sipil Mogara	
1 04 01 2.05 11	Biaya-biaya Tidak Implementasi Peraturan Pemerintah Undang- Undang	Jumlah Orang yang Menerima Biaya-biaya Tidak Implementasi Peraturan Pemerintah Undang-Undang				26 Orang		165.000.000					26 Orang	165.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Revisi Capaian RPJMD Tahun 2021	Probleman Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendukung						Kelompok Kerenn	Probleman Mekanisme Tahun 2024		Kendali
						Target 2023	Pagu Indikat	Lokasi	Sumber Dana	Penerimaan			Target	Pagu Indikat	
										National	Daerah				
1 04 01 2 06	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi pemerintahan, kinerja keuangan dan administrasi dan sarana prasarana pemerintahan serta pemertan organisasi	%	%	100 %	225.000.000		Kab. Ponorogo Bant. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abahai Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	persasional Kantor	60 Paket	6.000.000	
1 04 01 2 06 01	Pengelolaan Komponen Instansi/Lemb. Pemerintahan Bantuan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instansi/Lemb. Pemerintahan Bantuan Kantor yang Disediakan			60 Paket	6.000.000		Kab. Ponorogo Bant. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abahai Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	persasional Kantor	60 Paket	6.000.000	
1 04 01 2 06 05	Pengelolaan Barang Cerdas dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cerdas dan Pengadaan yang Disediakan			60 Paket	35.000.000		Kab. Ponorogo Bant. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abahai Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	persasional Kantor	60 Paket	35.000.000	
1 04 01 2 06 09	Pengelolaan Rupa Kandungan dan Kemah SATO	Jumlah Laporan Pengelolaan Rupa Kandungan dan Kemah SATO			50 Laporan	104.000.000		Kab. Ponorogo Bant. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abahai Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	persasional Kantor	50 Laporan	104.000.000	
1 04 01 2 07	Pengelolaan Barang M&M Daerah Pemungutan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi pemerintahan, kinerja keuangan dan administrasi dan sarana prasarana pemerintahan serta pemertan organisasi	%	%	100 %	132.000.000		Kab. Ponorogo Bant. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abahai Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	pendatan dan Mekan	8 Unit	112.000.000	
1 04 01 2 07 06	Pengelolaan Peredaran dan Mekan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peredaran dan Mekan Lainnya yang Disediakan			8 Unit	112.000.000		Kab. Ponorogo Bant. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abahai Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	pendatan dan Mekan	8 Unit	112.000.000	
1 04 01 2 08	Pengelolaan Jasa Pemungutan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi pemerintahan, kinerja keuangan dan administrasi dan sarana prasarana pemerintahan serta pemertan organisasi	%	%	100 %	100.000.000		Kab. Ponorogo Bant. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abahai Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	persasional Kantor	12 Laporan	20.000.000	
1 04 01 2 08 02	Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	50.000.000		Kab. Ponorogo Bant. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abahai Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	persasional Kantor	12 Laporan	20.000.000	
1 04 01 2 08 04	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			20 Laporan	50.000.000		Kab. Ponorogo Bant. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abahai Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	persasional Kantor	20 Laporan	50.000.000	

Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan																	
Kode	Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilman Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan						Kategori Saran	Profilman Madya Rencana Tahun 2024		Kode/Detail		
						Target 2023	Pagu Indikat	Lokasi	Sumber Dana	Pencapaian			Target	Pagu Indikat			
										Nasional	Daerah						
1 04 01 2.09	Pembangunan Ruang MRA Daerah Pemukiman Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi pemerintahan, kinerja organisasi dan administrasi dan sarana prasarana pemerintahan serta pelayanan organisasi	%		%	100 %	120.000.000							100 %	120.000.000		
1 04 01 2.09 01	Pengembangan Ruang Pemukiman, Boga Pemukiman, dan Pagar Pemukiman Pemukiman Desa atau Kelurahan Desa atau Kelurahan Desa atau Kelurahan Desa	Jumlah Kelurahan Pemukiman Desa atau Kelurahan Desa yang telah dibangun dan dilengkapi Pagar				20 Unit	60.000.000	Kab. Paseran Barat, Semua Kecamatan, Seluruh Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Absekar Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Barang MRA Daerah	20 Unit	60.000.000			
1 04 01 2.09 06	Pembangunan Perumahan dan Mekanik Lainnya	Jumlah Perumahan dan Mekanik Lainnya yang telah dibangun				60 Unit	40.000.000	Kab. Paseran Barat, Semua Kecamatan, Seluruh Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Absekar Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Barang MRA Daerah	60 Unit	40.000.000			
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Keseluruhan jumlah rumah yang memperoleh rumah layak huni (PMH)	%		%	100 %	11.200.000.000							100 %	200.000.000		
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kertas Binaan atau Rehabilitasi Program Kependudukan/Kota	Fasilitas pengkondisian dan Rehabilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat terdampak risiko program pemerintah Kependudukan/Kota	%		%	100 %	11.200.000.000							100 %	200.000.000		
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah layak huni Kependudukan/Kota yang Terancam	Jumlah Rumah Kertas Binaan Kependudukan/Kota yang Terancam				2200 Unit Rumah	11.000.000.000		Dana Transfer Umum Dana Absekar Umum				2200 Unit Rumah	0		1 01	
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah layak huni Kependudukan/Kota yang Terancam	Jumlah Rumah layak huni Kependudukan/Kota yang Terancam				4 Unit Rumah	200.000.000	Kab. Paseran Barat, Semua Kecamatan, Seluruh Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Absekar Umum				4 Unit Rumah	200.000.000		1 01	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN	Peningkatan arsitektur rumah	%		%	2,95 %	4.392.693.389							2,95 %	4.392.693.389		
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dengan Lahan di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan arsitektur rumah	%		%	2,95 %	4.392.693.389							2,95 %	4.392.693.389		

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rendahnya Capaian RPJMD Tahun 2021	Pembinaan Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendukung						Kategori Sasaran	Pembinaan Madya Sasaran Tahun 2024		Kode/Detail
						Target 2023	Pagu Indikat	Lokasi	Sumber Dana	Pencapaian			Target	Pagu Indikat	
										Nasional	Daerah				
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tdk Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tdk Layak Huni yang Diperbaiki	%			150 Unit Rumah	1.212.081,300	Kab. Paseran Barat, Samudra Kecamatan, Samudra Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abdiat Umum Dana Fasil Bidang Perumahan dan Permukiman Abdiat Melayan Perumahan Rumah Sederoga	Mengikuti Indikator Unit Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Ekonomi Dan Melayan Daerah	Perumahan dan pengembangan perumahan masyarakat	yang mendukung RT/RT di bawah kawasan kawasan	150 Unit Rumah	1.212.081,300	2 04
1 04 03 2.03 06	Pedukutan Pembangunan Perumahan/ Perumahan Perumahan Rumah	Luas Perumahan Rumah yang Diperbaiki/Diranggar	%			58 Ha	3.090.000,000	Kab. Paseran Barat, Samudra Kecamatan, Samudra Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abdiat Umum	Mengikuti Indikator Unit Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Ekonomi Dan Melayan Daerah	Perumahan dan pengembangan perumahan masyarakat	yang mendukung RT/RT di bawah kawasan kawasan	58 Ha	3.090.000,000	2 04
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN RUMAH	Cakupan ketertarikan rumah layak huni	%			90,04 %	2.010.976.000						90,04 %	2.010.976.000	
1 04 04 2.01	Perbaikan Perumahan dan Kawasan Perumahan Rumah pada Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketertarikan rumah layak huni	%			90,04 %	2.010.976.000						90,04 %	2.010.976.000	
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tdk Layak Huni untuk Perumahan Terbatas Tumbuh dan Berkelanjutan Perumahan Rumah di Kawasan Perumahan Rumah dengan luas di bawah 10 Dapuk/1 Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tdk Layak Huni untuk Perumahan Terbatas Tumbuh dan Berkelanjutan Perumahan Rumah di Kawasan Perumahan Rumah dengan luas di bawah 10 Dapuk/1 Ha yang Diperbaiki	%			100 Unit Rumah	2.010.976.000	Kab. Paseran Barat, Samudra Kecamatan, Samudra Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abdiat Umum	Mengikuti Indikator Unit Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Ekonomi Dan Melayan Daerah	Perumahan dan pengembangan perumahan masyarakat	yang mendukung RT/RT di bawah kawasan kawasan	100 Unit Rumah	2.010.976.000	2 04
1 04 05	PROGRAM Peningkatan PAKSABANA, SAKSABANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%			0,59 %	935.000.000						0,59 %	935.000.000	
1 04 05 2.01	Unsur Pengembangan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%			0,59 %	935.000.000						0,59 %	935.000.000	
1 04 05 2.01 02	Perbaikan Perumahan, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Meningkatkan Fungsi Hunian	Jumlah Unit Perumahan yang Diperbaiki Perumahan, Sarana, dan Utilitas Umum yang Meningkatkan Fungsi Hunian	%			20 Lantai	935.000,000	Kab. Paseran Barat, Samudra Kecamatan, Samudra Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Abdiat Umum	Mengikuti Indikator Unit Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Ekonomi Dan Melayan Daerah	Perumahan dan pengembangan perumahan masyarakat	yang didukung oleh pengembangan	20 Lantai	935.000,000	2 04
1 04 06	PROGRAM Peningkatan KUALIFIKAS, KLASIFIKAS DAN REGISTRAS BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN	Perentase Pengembangan yang Tersebut	%			60 %	55.500.000						60 %	55.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Revisi Capaian RPJMD Tahun 2021	Profil Capaian Target RPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kemajuan Pendanaan						Profil Capaian Maju Rencana Tahun 2024		Kategori	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pencapaian		Kategori	Target		Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah				
2	180 K05.2.01.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Masalah Garis Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20 Dokumen	180.611.812	Kab. Puntarenan Barat, Samudra Karimata, Uman, Uman Utara, Uman	Dana Transfer	Mengunjungi Grabitan Kabupaten Karimata dan Uman Utara	Peningkatan pengamatan gempa oleh masyarakat lokal dan budaya	Mengunjungi yang terkumpul (gempa) ngi	20 Dokumen	180.611.812	
TOTAL							21.159.491.088							12.164.991.088	

BAB V

PENUTUP

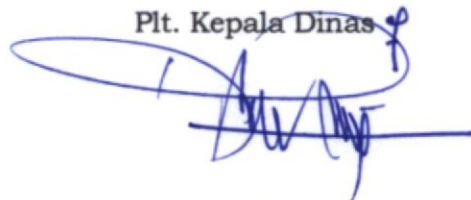
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Juli 2022

Plt. Kepala Dinas



ASRI HAMDI, ST

Pembina / IV.a

NIP. 197611232005011012



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 188.45/566/BUP-PASBAR/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Kerja diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Melakukan koordinasi dan integrasi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
3. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 kepada Bupati.

B. Sekretaris

1. Melakukan penyiapan koordinasi dan dokumentasi administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
2. Melakukan koordinasi dengan Anggota dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan

4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Anggota

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sesuai visi dan misi serta sasaran kepala daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;
4. Melaksanakan pembahasan, dan juga identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
6. Merumuskan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
8. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 2023;
9. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
10. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ; dan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 30 September 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 188.45/ 566 /BUP-PASBAR/2022
Tanggal : 30 September 2022
Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan
Ketua	Asri Hamdi, ST	Plt. Kepala
Sekretaris	Eli Martona, S.Si, M.Si	Sekretaris
Anggota	Wildan, SH, M.Si	Kabid Perumahan
Anggota	Elifsan, SH	Kabid Pertanahan
Anggota	Mudirman, SE	Fungsional Perencana
Anggota	Zakial Himmi, ST	Fungsional Teknis Tata Bangunan dan Perumahan
Anggota	Popi Jasmiati, ST	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Anggota	Irsamora	Fungsional Analis Kebijakan
Anggota	Berhat Nanang Kesuma, ST	Fungsional Analis Kebijakan

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI